

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaku ekonomi terbesar di Indonesia diharapkan mampu terus tumbuh dan berkembang agar mampu melakukan kompetisi di era yang semakin terbuka. Dengan aset yang cukup besar dan bergerak pada hampir semua bidang ekonomi seperti industri perdagangan, kawasan industri dan jasa konstruksi, perhubungan telekomunikasi dan pariwisata, pertanian dan perkebunan, pelayanan umum dan lain-lain, kinerja BUMN diindikasikan sangat berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Indonesia.

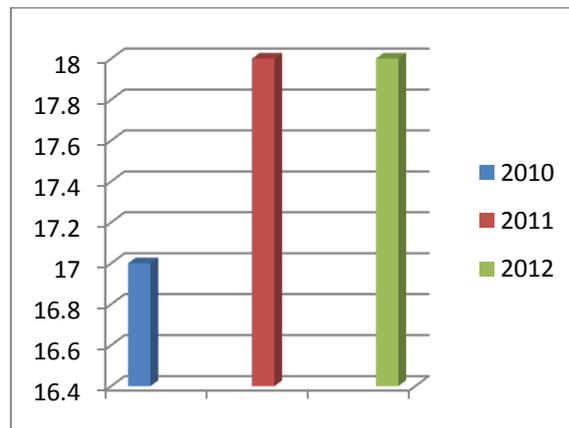
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang-Undang Nomor 19 pasal 1 butir 1 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mendefinisikan bahwa BUMN adalah Badan usaha yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi beberapa sektor, antara lain: sektor farmasi, sektor energi, sektor logam, sektor konstruksi, sektor pertambangan, sektor semen, sektor angkutan dan sarana angkutan, dan sektor telekomunikasi (www.sahamok.com, diakses 10 April 2014). Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap Negara sangat signifikan, sejak tahun 1998 pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi Pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementrian (www.bumn.go.id, diakses pada 4 April 2013).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain menyumbang negara melalui deviden dan berbagai pajak (PPH, PPN, Pajak Ekspor dan BPHTB) juga digunakan sebagai sumber pembiayaan defisit APBN melalui program privatisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 pasal 1 butir 12 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, privatisasi adalah penjualan saham kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi Negara dan masyarakat, serta memperluas saham oleh masyarakat. Privatisasi melalui pasar modal akan terus dilakukan sebagai salah satu cara untuk

meningkatkan transparansi dan *control public*, independensi, serta kinerja BUMN, dengan tetap memperhatikan kepemilikan mayoritas pemerintah (www.bumn.go.id, diakses pada 10 April 2014).

Jumlah emiten pada Badan Usaha Milik Negara dibandingkan dengan total seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat di grafik 1.1 berikut :

Grafik 1.1
Jumlah Emiten Badan Usaha Milik Negara
di BEI (2010-2012)



Sumber : www.bumn.go.id, diakses 10 April 2014

Kinerja BUMN di Indonesia saat ini bisa dikatakan mengalami kemajuan, karena pada tahun 2010 sampai dengan 2012 perkembangan aktiva, ekuitas dan laba bersih BUMN terlihat semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kinerja Pokok BUMN
Tahun 2010-2012
(dalam Triliun)

Keterangan/Tahun	2010	2011	2012
Aktiva	2341	2947	3467
Ekuitas	570	689	822
Laba Bersih	101	122	139

Sumber : www.bumn.go.id, diakses 10 April 2014

1.2 Latar Belakang Penelitian

Dalam menghadapi persaingan usaha yang kompetitif, perusahaan berusaha memperbaiki kinerja untuk mengembangkan perusahaannya. Perusahaan didirikan dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Memaksimalkan nilai perusahaan bermakna luas dari memaksimalkan laba, didasarkan beberapa alasan yaitu memaksimalkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang, memaksimalkan nilai juga berarti mempertimbangkan berbagai resiko terhadap diterima dimasa yang akan datang (Weston&Copelan, 1995,134; dalam Nur'Aeni, 2010:1).

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan yaitu pelaksanaan *corporate governance* yang baik. *Corporate governance* dinilai penting sebagai peraturan yang efektif untuk berkontribusi kepada daya tarik negara untuk investasi internal dan perkembangan bisnis. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Saputra, 2010). Tata kelola perusahaan menjadi kewajiban setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan kinerja para manajemen dalam mengendalikan praktek kecurangan dalam korporasi, juga menentukan arah dan pengendalian kinerja perusahaan (Manik, 2011).

Dalam memaksimalkan kinerja perusahaan dimungkinkan akan timbul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham yang sering disebut *agency problem*. Hubungan manajer dengan pemegang saham di dalam *agency theory* digambarkan sebagai hubungan antara *agent* dan *principal* (Schroeder et al., 200; dalam Christiawan dan Tarigan, 2007). Pihak manajemen adalah wakil dari perusahaan atau dengan kata lain pihak manajemen adalah *agent* yang berperan mengelola perusahaan dan pemegang saham berperan sebagai *principal*. Pada dasarnya, teori keagenan menjelaskan konsep bahwa adanya pemisahan antara pemilik dan manajemen perusahaan. Hal ini mengakibatkan antara *agent* dan *principal* tidak selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik dana, sehingga timbul masalah keagenan (*agency problem*) yang akan menambah biaya

berupa biaya keagenan (*agency cost*) (Jensen dan Meckling, 1976; dalam Noviwawan dan Septiani 2013). Konflik dapat terjadi apabila ketika adanya kecurigaan dari pihak *principal* terhadap *agent* sehingga dibutuhkan pengawasan tambahan yang dilakukan pihak pemegang saham dan hal inilah yang akan menjadi *agency cost*.

Lemahnya *corporate governance* sering disebut sebagai salah satu penyebab krisis keuangan di Negara-negara di Asia (Johnson, dkk, 2000; dalam Nofiani dan Nurmawanti, 2010). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), Indonesia menempati posisi tiga terbawah Negara Asia dalam menerapkan *corporate governance*, dapat dilihat di tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Hasil Survei Penerapan Good Corporate Governance

No	Negara	Skor	
		Tahun 2000	Tahun 2012
1	Singapura	2,00	0,67
2	Hongkong	3,59	2,64
3	Jepang	4,00	1,90
4	Filipina	5,00	6,10
5	Taiwan	6,10	5,46
6	Malaysia	6,20	5,59
7	Thailand	6,67	6,57
8	China	8,22	7,00
9	Indonesia	8,29	8,50
10	Korea Selatan	8,83	6,90
11	Vietnam	8,89	7,75

Keterangan: *semakin tinggi skor, semakin buruk good governance*

Sumber: PERC tahun 2000 dan 2012

Salah satu alasan perlunya pemerintah melakukan reformasi BUMN berkaitan erat dengan kondisi kinerja dan kesehatan BUMN itu sendiri. Besarnya ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh BUMN nampaknya belum seimbang dengan kinerja yang dihasilkan (Jubaedah, 2007). Agar kelangsungan hidup suatu perusahaan tetap stabil, maka pihak manajemen harus dapat mempertahankan dan memacu peningkatan kinerjanya.

Kepmen 100 tahun 2002 merupakan Keputusan Menteri yang berisi tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang berlaku bagi seluruh BUMN jasa keuangan maupun BUMN non jasa keuangan. Kepmen 100 tahun 2002 diadaptasi dari konsep *Balance Scorecard*. Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian:

- a. Aspek Keuangan
- b. Aspek Operasional
- c. Aspek Administrasi

Nilai kesehatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat berdampak pada respon investor terhadap perusahaan. Jika kondisi keuangan sehat, kinerja keuangan perusahaan akan berjalan efektif, maka laba pun akan meningkat, dan laba yang tinggi tersebut, akan berdampak pula pada return yang tinggi juga, sehingga dapat memicu reaksi dari investor untuk membeli saham tersebut, semakin banyak permintaan saham, maka akan berdampak pada peningkatkan harga saham.

Tabel 1.3
Tingkat Kesehatan

No	Nama Perusahaan	Nilai Kesehatan		
		2010	2011	2012
1	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	A (Sehat)	A (Sehat)	A (Sehat)
2	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	BBB (Kurang Sehat)	BBB (Kurang Sehat)	BBB (Kurang Sehat)

Sumber : (www.pefindo.com, diakses pada tanggal 15 Mei 2014)

Tabel 1.4
Respon Investor

No	Nama Perusahaan	Tingkat Kesehatan	Respon Investor (dalam Triliun)		
			2010	2011	2012
1	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	A (Sehat)	1.629	3.677	9.031
2	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	BBB (Kurang Sehat)	3.847	2.349	4.109

Sumber : (www.idx.go.id, diakses pada 15 Mei 2014)

Dapat kita lihat dari tabel 1.4, Respon investor yang dilihat dari kapitalisasi pasar pada sampel perusahaan yang mendapatkan penilaian “Sehat” setiap tahunnya semakin meningkat, hal ini menunjukkan bahwa adanya respon yang positif dari investor sedangkan perusahaan yang mendapatkan penilaian “Kurang Sehat” kapitalisasi pasarnya berfluktuasi atau tidak stabil, hal ini menunjukkan bahwa harga saham pada perusahaan tersebut juga tidak stabil dan investor pun cenderung ingin menghindari jumlah saham suatu perusahaan yang tidak stabil karena jumlah saham suatu perusahaan akan digunakan investor untuk menilai prospek suatu perusahaan di masa yang akan datang.

Tingkat kinerja dan kondisi perusahaan pada tubuh BUMN dapat dilihat oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja BUMN antara lain intervensi pihak luar yang berkuasa sehingga pengambilan keputusan bisnis oleh direksi yang independen tidak muncul. Selain itu, krisis ekonomi, kondisi politik yang tidak stabil, globalisasi dan perubahan perilaku konsumen juga ikut mempengaruhi turunnya kinerja perusahaan. Adapun faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja BUMN antara lain rendahnya kinerja BUMN antara lain rendahnya penerapan *good corporate governance* sehingga tidak ada kewajiban, transparansi, dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis. Faktor internal lainnya adalah tidak berfungsinya sistem perencanaan dan pengendalian internal terutama karena kurang berdayanya komisaris sebagai pengawas. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya menimbulkan aneka penyimpangan, salah satu contohnya adalah kasus korupsi (Jubaedah, 2007).

Hasil survei *Transparency International*, selama kurun waktu lima tahun, Indonesia masih dalam kategori negara korup karena masih memperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di bawah 3 (Kurniawan, 2011). Salah satu fakta bahwa Indonesia melakukan tindak korupsi yaitu terjadi pada kasus korupsi Hambalang yang melibatkan General Manager Departemen Gedung dan Manajer Keuangan dan Human Capital PT Wijaya Karya yang melakukan gratifikasi yang merugikan negara sebesar Rp 2,5 triliun, kerugian tersebut merupakan akibat dari

gagalnya pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan yang diharapkan (www.detik.com, diakses pada tanggal 23 April 2014).

Indikasi dari kondisi tersebut dimungkinkan karena lemahnya mekanisme *corporate governance* dalam perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu aspek mekanisme *corporate governance* dalam PT Wijaya Karya yaitu jumlah kepemilikan saham pihak manajerial pada tahun 2012 hanya sebesar 0,72% dari kepemilikan saham keseluruhan (www.idx.co.id, diakses pada tanggal 23 April 2014). Dengan kecilnya proporsi kepemilikan saham manajerial yang dimiliki PT Wijaya Karya, maka dari itu dimungkinkan bahwa pengawasan dari pihak intern dinilai lemah, sehingga manajer akan bersifat oportunistik. Yang dimaksud dengan perilaku oportunistik adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya, demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu (www.wikipedia.co.id diakses pada 15 Mei 2014).

Fenomena yang telah diuraikan pada tabel 1.2, tabel 1.4, dan adanya kasus korupsi yang terjadi pada salah satu perusahaan di BUMN dapat diatasi dengan salah satu mekanisme yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). *Corporate governance* merupakan suatu proses dan tata kelola yang digunakan oleh organisasi perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan. Pada prinsipnya *corporate governance* (tata kelola perusahaan) menyangkut kepentingan para pemegang saham yaitu dengan memberikan perlindungan dan jaminan hak terhadap *stakeholder*, termasuk di dalamnya yaitu *stakeholders* yang lain (Hastuti, 2005).

Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik diharapkan saham perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor. Terdapat empat mekanisme *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit (Rahmawati, 2007; dalam Suyanti et al, 2010).

Beberapa penelitian yang meneliti tentang mekanisme *corporate governance* yaitu salah satunya pengaruh mekanisme kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan, yang telah dilakukan oleh Saputra (2010), Amyulianthy (2012) dan Noviawan dan Septiani (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, hal ini diindikasikan karena dengan kepemilikan oleh manajer dapat menurunkan *conflict of interest* yang disebabkan oleh masalah keagenan antara pemilik dan manajer. Hasil penelitian ketiganya ternyata tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wiranata dan Nugrahanti (2013) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, karena kepemilikan manajerial dalam perusahaan masih sangat rendah maka kinerja manajer sebagai pihak minoritas belum optimal.

Struktur mekanisme *corporate governance* lainnya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti asuransi, bank atau institusi lain (Tarjo, 2008 dalam Permanasari 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Amyulianthy (2012), menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan, hal ini mendukung pernyataan Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan. Namun terdapat inkonsistensi dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Saputra (2010) dan Wiranata dan Nugrahanti (2013), menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa banyak institusi pada hakikatnya tidak melakukan pengawasan penuh terhadap perusahaan publik sehingga manager dapat mengambil keputusan yang lebih leluasa didalam pengelolaan manajemen perusahaan. Akibatnya, investor institusi ini gagal untuk memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam mekanisme *corporate governance* selain kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yaitu adanya proporsi dewan komisaris independen. Menurut Sekaredi (2011), perusahaan yang sudah melakukan *corporate*

governance diwajibkan untuk mempunyai dewan komisaris. Penelitian yang dilakukan oleh Carningsih (2012) dan Noviawan dan Septiani (2013), menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Anggota komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham pengendali masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat. Dalam penelitian lainnya ditemukan ketidak konsistenan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Manik (2011) dan Amyulianthy (2012) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut menepis bahwa keberadaan komisaris independen bukan hanya sebagai formalitas saja dalam organ perusahaan dan indikasi timbulnya *agency cost* sebagai akibat dari *agency problem* tidak terjadi sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) melalui keputusan Kep 339/BEJ/07-2001 mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki komite audit. Komite audit dalam suatu perusahaan bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit akan memperkecil kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*) dengan cara melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan pengawasan dari audit eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Manik (2011), menemukan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Noviawan dan Septiani (2013), komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, hal ini disebabkan karena keberadaan komite audit dalam perusahaan hanya sebatas formalitas untuk menaati aturan BAPEPAM namun kenyataannya fungsi komite audit di perusahaan belum berjalan dengan baik.

Hal lain yang mendukung pengawasan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah dan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing. Dalam BUMN, pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas, dengan besarnya kepemilikan saham pemerintah dirasa pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja

perusahaan dengan efektif. Penelitian Ghazali (2010), menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap *Corporate Performance*. Namun ditemukan inkonsistensi dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiranata dan Nugrahanti (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, hal ini diindikasikan karena perusahaan milik pemerintah memiliki tujuan lain seperti sosial dan politik daripada memaksimalkan *profit*.

Struktur kepemilikan lain yaitu kepemilikan saham yang dimiliki oleh asing. Kepemilikan asing mengacu pada lengkap atau sebagian kepemilikan atau penguasaan suatu bisnis atau sumber daya dalam negeri oleh individu yang bukan warga negara dari negara itu, atau dengan perusahaan yang merupakan kantor pusat tidak di negara itu (www.wikipedia.com, diakses 10 April 2014).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wiranata & Nugrahanti (2010) yang menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dalam penelitian pengaruh kepemilikan asing terhadap kinerja perusahaan lainnya, ditemukan adanya ketidak konsistenan dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2010), yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini diindikasikan bahwa investor asing tidak efektif dalam memonitor perilaku manajemen dalam rangka menyelaraskan kepentingan manajemen dan para pemegang saham.

Untuk menilai penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan, dapat dinilai dari kinerja perusahaan tersebut. *Tobin's Q* merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, khususnya tentang kinerja perusahaan, yang menunjukkan suatu performa manajemen dalam mengelola aktiva perusahaan (Permanasari, 2010). Menurut penelitian yang dilakukan Asba (2009), menunjukkan bahwa *corporate governance* mempengaruhi *Tobin's Q* sebagai ukuran kinerja perusahaan. Dengan demikian *Tobin's Q* sebagai ukuran kinerja perusahaan berpengaruh terhadap besar dan kecilnya *corporate governance* yang tercermin dalam skor pemeringkatan *corporate governance perception index* dengan arah positif bahwa semakin besar perusahaan semakin besar pula

kemungkinan diterapkannya *Tobins'Q* sebagai ukuran kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar juga menerapkan *Tobins'Q* sebagai ukuran kinerja pada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Asba (2009) konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nurmayanti & Nofiani (2010), menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh secara positif terhadap *Tobins'Q* sebagai salah satu ukuran kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka kinerja pasar perusahaan pun akan meningkat, sehingga perusahaan mampu menghasilkan *earning* dan *rate of return* yang sesuai dengan harga perolehan aset-asetnya. Dan ini tentu akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan, kesejahteraan karyawan maupun pemegang saham yang akan ikut meningkat. Dalam penelitian lain ditemukan inkonsistensi dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasinta (2012) bahwa tidak berpengaruh signifikan antara *good corporate governance* dengan *Tobins'Q*, hal ini menunjukkan bahwa pencapaian laba perusahaan dan respon pasar atas implementasi *good corporate governance* masih kurang.

Adanya inkonsistensi dalam penelitian sebelum-sebelumnya, serta fenomena yang terjadi membuat penelitian ini masih relevan untuk mengkaji ulang dengan variabel baru dan ruang lingkup yang berbeda. Peneliti termotivasi untuk menganalisa lebih jauh pengaruh *ownership structure* dengan sub variabel yaitu kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing serta pengaruh *corporate governance mechanism* dengan sub variabel yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *corporate performance* yaitu kinerja perusahaan yang diukur dengan *Tobins'Q* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Non Keuangan yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pengaruh *Ownership Structure* dan *Corporate Governance Mechanism* Terhadap *Corporate Performance* (Studi pada Badan Usaha Milik Negara Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2010-2012)”**

1.3 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat *ownership structure*, *corporate governance mechanism* dan *corporate performance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Non Keuangan tahun 2010-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 2) Bagaimana pengaruh secara simultan *ownership structure* (kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing) dan *corporate governance mechanism* (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit) terhadap *corporate performance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Non Keuangan tahun 2010-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- 3) Bagaimana pengaruh secara parsial *ownership structure* dan *corporate governance mechanism* terhadap *corporate performance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Non Keuangan tahun 2010-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia :
 - a) Kepemilikan Pemerintah terhadap *corporate performance*,
 - b) Kepemilikan Asing terhadap *corporate performance*,
 - c) Kepemilikan Manajerial terhadap *corporate performance*,
 - d) Kepemilikan Institusional terhadap *corporate performance*,
 - e) Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *corporate performance*, dan
 - f) Komite Audit terhadap *corporate performance*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana tingkat *ownership structure* (kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing) dan *corporate governance mechanism* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit) terhadap *corporate performance* dalam Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) Non Keuangan tahun 2010-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

- 2) Untuk menjelaskan pengaruh secara simultan *ownership structure* (kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing) dan *corporate governance mechanism* (kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit) terhadap *corporate performance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Non Keuangan tahun 2010-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- 3) Untuk menjelaskan pengaruh secara parsial *ownership structure* dan *corporate governance mechanism* terhadap *corporate performance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Non Keuangan tahun 2010-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia :
 - a) Kepemilikan Pemerintah terhadap *corporate performance*,
 - b) Kepemilikan Asing terhadap *corporate performance*,
 - c) Kepemilikan Manajerial terhadap *corporate performance*,
 - d) Kepemilikan Institusional terhadap *corporate performance*,
 - e) Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *corporate performance*, dan
 - f) Komite Audit terhadap *corporate performance*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai *ownership structure* dan *corporate governance mechanism* yang didapatkan selama masa kuliah serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sarana pengembangan serta menjadi acuan untuk penelitian yang berkaitan dengan *ownership structure* dan *corporate governance mechanism* pada

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Non Keuangan tahun 2010-2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.5.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1) Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan acuan pengambilan keputusan investasi.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar perusahaan memiliki sikap waspada sebagai upaya untuk meminimalisasi tindakan oportunistik manajemen dalam praktik manajemen laba yang menyimpang, serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas mengenai gambaran ringkas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Bab Pendahuluan berisi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Membahas mengenai teori yang menjadi dasar bagi penelitian ini dan juga menjelaskan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bab Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian berisi tentang rangkuman teori, penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian, variabel operasional yang digunakan dalam penelitian, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian rinci objek penelitian, langkah-langkah analisis data, dan hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dan saran dari peneliti yang berguna bagi penelitian selanjutnya.